

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

NAMA, TAHUN, JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Riana Anugrah Fitri (2012) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan</i>	<i>Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan</i>	Deskriptif Kuantitatif	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Vesy Novrianti (2010) pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dan <i>Good corporate governance</i> Terhadap kinerja perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur di bea tahun 2009-2011)	<i>corporate social responsibility, Good corporate governance</i> Dan kinerja perusahaan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian tidak membuktikan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Cici Putri Dianawati (2016) Pengaruh CSR	<i>corporate social responsibility, Good corporate</i>	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian mengatakan bahwa semua variabel independen

NAMA, TAHUN, JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Dan GCG Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening	<i>governance</i> Dan kinerja perusahaan		menimbulkan dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas (ROE) sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan variabel <i>corporate social responsibility (CSR)</i> , <i>good corporate governance (GCG)</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Responsibility tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap semua rasio keuangan yang digunakan melalui rasio keuangan Return On Asset, Return On Equity serta Earning Per Share.
Islahuddin (2009) Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap Nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajemen Sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta)	<i>corporate social responsibility</i> , Nilai perusahaan dan prosentase kepemilikan manajemen	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian ini membuktikan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan prosentase kepemilikan manajemen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Dima Jamali, Mohammad Hallal and Hanin Abdallah (2009)	<i>Corporate Social Responsibility dan Corporate</i>	Deskriptif Kuantitatif	applications of corporate governance and corporate social responsibility principles in

NAMA, TAHUN, JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Corporate governance and corporate social responsibility: evidence from the healthcare sector	governance		a very important sector that has not received systematic attention and consideration in the literature

Sumber : Jurnal akuntansi dan Bisnis

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan faktor yaitu *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan kinerja keuangan. Peneliti memilih lokasi penelitian umumnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 *Corporate Social Responsibility*

Menurut konsep *signal theory* menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal - sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaannya. Selain informasi keuangan yang diwajibkan perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Salah satu dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR ini merupakan sebuah sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan yang nantinya akan direspon oleh *stakeholder* dan *shareholder* melalui perubahan harga saham perusahaan dan perubahan laba perusahaan.

Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum Darwin (2004) dalam Melisa Syahnaz (2012).

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat terhadap lingkungan serta komitmen dunia usaha Melisa Syahnaz (2012). CSR bukan hanya kegiatan *karikatif* perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Dari berbagai pengertian CSR sangat beragam dapat disimpulkan bahwa CSR adalah operasi bisnis perusahaan yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan yang menyeluruh, melembaga dan berkelanjutan. Ditinjau dari motivasinya CSR dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community* dan *community development*.

Hubungan antara informasi sosial dengan kinerja sosial pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), kinerja sosial dengan ekonomi. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi social memiliki resiko sistematis yang dan tingkat *lverage* yang rendah dan cenderung perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan sosial selalu berkaitan positif dengan kinerja perusahaan.

Menurut Suharto (2008) dengan menggunakan dua pendekatan minimal ada delapan kategori perusahaan dalam melaksanakan CSR. Pendekatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan porsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR dan tujuan CSR apakah untuk promosi atau pemberdayaan.

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya profit.
 - a. Perusahaan Minimalis yaitu perusahaan dengan profit yang rendah dan memiliki anggaran CSR yang rendah
 - b. Perusahaan Ekonomis yaitu perusahaan yang memiliki keuntungantinggi namun anggaran CSR nya rendah
 - c. Perusahaan Humanis yaitu perusahaan yang memiliki profit yang rendahnamun memiliki anggaran CSR yang relatif besar
 - d. Perusahaan Reformis yaitu perusahaan yang memiliki profit besar dan anggaran CSR yang besar.
2. Berdasarkan tujuan untuk promosi atau pemebrdayaan masyarakat
 - a. Perusahaan pasif yaitu perusahaan yang menerapkan CSR dengan tujuan yang tidak jelas. Bukan untuk promosi bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat
 - b. Perusahaan Impresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan sebagai sarana promosi bagi perusahaan

- c. Perusahaan Agresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat disamping juga bertujuan promosi
- d. Perusahaan Progresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan promosi sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kategori Pengungkapan CSR menggunakan standar dari GRI (Global Reporting Initiative). GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dasar sustainability reporting (Dahlia Dan Siregar 2008). Dalam GRI berisi beberapa indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja Ekonomi
2. Indikator Kinerja Lingkungan
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia
5. Indikator Kinerja Sosial
6. Indikator Kinerja Produk

1.2.2 *Good Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* tidak hanya memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer,

pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu Bambang Listyo (2013).

Good Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor Perseroan Gabriella (2013).

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dalam Rizky Arifani (2012) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang

berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal.

Kurnianingsih dan Supomo (2008) dalam Gabriela (2013) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi, menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI, mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan, menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan. Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentase

saham biasa dan atau opsi saham yang dimiliki direktur dan *officer*. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena bila terdapat keputusan yang salah manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Denga demikian, pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Negara/Pemerintahan : Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat.
- b. Sektor Swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta aktif dalm interaksi sistem pasar, seperti industry pengelolaan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah

dan perorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Adapun indikator – indikator *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut Bambang Listyo (2013):

a. Kepemilikan Institusional

Wahidahwati (2002) dalam Bambang (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Sejalan dengan itu Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

c. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

d. Ukuran Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Ukuran Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan.Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

f. Komite Audit

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas

pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian

1.2.3 Nilai Perusahaan

Menurut Brigham (2008) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Keown (2004) dalam Agustina (2013) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas pemegang saham yang beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan profitabilitas. Nilai perusahaan menurut Nurlala dan Islahudin (2008) didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Sehingga, nilai perusahaan merupakan nilai pasar perusahaan atau nilai jual perusahaan apabila perusahaan tersebut dijual yang dikaitkan dengan harga saham dan probabilitas, dan dijadikan dasar untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Kusumadilaga (2010), suatu perusahaan dikatakan

memiliki nilai perusahaan yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Apabila harga perusahaannya tinggi, maka dapat dikatakan nilai perusahaannya juga baik.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (Hadianto, 2013).

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut Weston dan Copelan (2008) dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari :

a) *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Tandelilin (2007) PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Laba perlembar saham}}$$

b) *Price to Book Value (PBV)*

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhrudin dan Hadianto, 2009).

Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Nilai buku saham}}$$

c) *Tobin's Q*

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut :

$$Q = \frac{MVE + DEBT}{TA}$$

Keterangan:

Q = Nilai perusahaan

MVE = Nilai pasar ekuitas (jumlah saham beredar \times *closing price*)

DEBT = (Utang lancar – aset lancar) + nilai buku persediaan + utang jangka panjang

TA = Nilai buku total asset

Menurut Herawati (2008) salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan, menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembangan dari setiap dolar investasi inkremental. Jika Tobin's Q > 1, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika Tobin's Q < 1, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Jadi Tobin's Q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya.

Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin's Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional

perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004 dalam Permanasari, 2010).

1.3 Pengaruh Antar Variabel

3.3.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan

Agustina (2013), pengungkapan CSR diharapkan akan mampu menaikkan nilai perusahaan. Karena kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan mampu memilih produk yang baik yang dinilai tidak hanya barangnya saja, tetapi juga melalui tata kelola perusahaannya. Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pada saat masyarakat yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, maka mereka akan loyal terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga hal ini akan mampu menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui harga saham yang akan meningkat.

3.3.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan

Good Corporate Governance di proksikan dengan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan Jumlah Anggota Komite Audit.

Menurut *agency theory*, pemisahan antara kepemilikan dan

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan principal dan agent mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan saling bertentangan karena agent dan principal berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Harumaan (2008) dalam Susanto (2011), perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis, sehingga merugikan pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan saham.

Adanya tingkat kepemilikan institusional dalam proporsi yang besar akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Wening (2009) semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

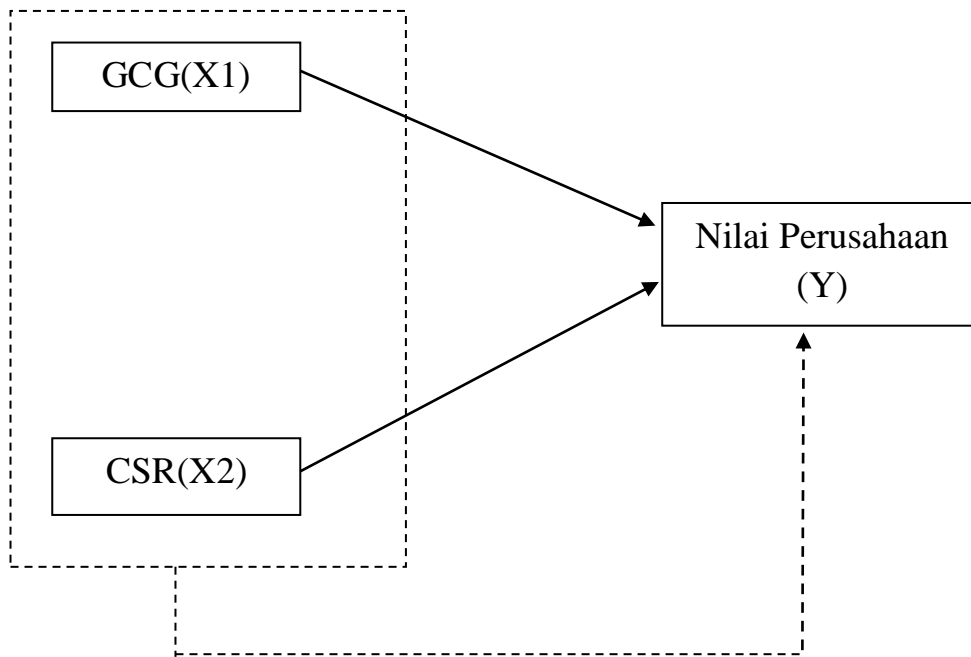
Menurut Herawaty (2008) menemukan pengaruh signifikan dalam hubungan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Namun, dalam Harjoto dan Jo (2007) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh lemah terhadap nilai perusahaan.

Komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas penyusunan laporan keuangan seperti menjaga sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good corporate governance. Komite audit berperan penting dalam menjamin terlaksananya corporate governance yang baik.

1.4 Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting Sugiyono (2012:88)

Jadi kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan hubungan antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan landasan teori dan didukung dengan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

1.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul Arikunto (2010:110).

Berdasarkan latar belakang, landasan teori disertai dengan bukti empiris penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis :

$H_1 = \textit{Good Corporate Governance}$ berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

$H_2 = \textit{Corporate Social Responsibility}$ berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan

$H_3 = \textit{Good Corporate Governance}$ dan $\textit{Corporate Social Responsibility}$ berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Perusahaan